



## DAFTAR BACAAN

### Buku

- Badruzaman, Mariam Darus et.al., *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Chomzah, Ali Ahmad, *Hukum Agraria (Pertanahan Indonesia) Jilid I*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2003.
- Effendi, Bachtiar, *Kumpulan Tulisan Tentang Tanah*, Alumni Bandung, 1993.
- Gautama, Sudargo, *Masalah Agraria*, Alumni, Bandung, 1973.
- Hadikusumah, Hilman, *Pengantar Ilmu Hukum Adat*, Mandar Maju, Bandung, 1992.
- Hamzah, Andi et.al., *Dasar-dasar Hukum Perumahan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000.
- Harsono, Boedi, *Undang-Undang Pokok Agraria, Sejarah Penyusunan, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta, 1971.
- Hasan, Djuendah, *Lembaga Jaminan Kebendaan bagi Tanah dan Benda Lainnya yang Melekat pada Tanah dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horisontal*, Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Limbong, Bernhard, *Konflik Pertanahan*, Pustaka Margaretha, Jakarta, 2012.
- Lubis, Mhd. Yamis dan Rahim Lubis, *Hukum Pendaftaran Tanah*, CV, Mandar Maju, Bandung, 2008.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2007, h. 169
- \_\_\_\_\_, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2005.
- Parlindungan, A.P., *Bunga Rampai: Hukum Agraria Serta Landreform*, Mandar Maju, Bandung, 1989.
- \_\_\_\_\_, *Konversi Hak-Hak Atas Tanah*, Mandar Maju, Bandung, 1990.
- Perangin, Effendi, *Praktek Permohonan Hak Atas Tanah*, CV Rajawali, Jakarta, 1987.

- Peranginangin, Effendi, *Tata Cara Permohonan Hak Baru Atas Tanah Bekas Hak Barat*, Esa Study Club, Jakarta, 1980.
- Pranjoto, Eddy, *Antinomi Norma Hukum Pembatalan Pemberian Hak Atas Tanah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dan Badan Pertanahan Nasional*, CV Utomo, Bandung, 2006.
- Salindeho, John, *Masalah Tanah dalam Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993.
- Santoso, Urip, *Hukum Agraria & Hak-hak Atas Tanah*, Kencana, Jakarta, 2008.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Airlangga University Press, Surabaya, 2013.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Perumahan*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014.
- \_\_\_\_\_, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- \_\_\_\_\_, *Perolehan Hak Atas Tanah*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015.
- Siahaan, Marihot Pahala, *Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Teori dan Praktek)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia (Suatu Pengantar untuk Mempelajari Hukum Adat)*, Rajawali, Jakarta, 1981.
- Soetomo, *Pembebasan, Pencabutan, Permohonan Hak Atas Tanah*, Usaha Nasional, Surabaya, 1984.
- Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Terjemahan Burgerlijk Wetboek*, Pradnya Paramita, 2006.
- Subekti, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2004.
- Supriadi, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Haar, Ter, diterjemahkan oleh Soebakti Poesponoto, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1985.

Yunus, Anwar, *Penuntun Praktis Perkara Perumahan di Jakarta*, Penerbit dan Balai Buku Ichtisar, Jakarta, 1979.

### **Majalah**

Hajati, Sri. *Wewenang Negara Atas Tanah*, Yuridika, Vol.18, No.2, Maret-April 2003.

Santoso, Urip, *Aspek Konsinyasi Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Majalah PRO JUSTITIA, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahiyangan, Bandung, Tahun XVI Nomor 4 Oktober 1998.

Maria, S.W. Sumardjono, "Hak Pengelolaan: Perkembangan, Regulasi dan Implementasinya", *Jurnal MIMBAR HUKUM*, Edisi Khusus, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2007.

\_\_\_\_\_, S.W. Sumardjono, "Tanah Negara", *Surat Kabar Harian Kompas*, Minggu IV, Agustus, 1994.

### **Penelitian**

Sumardji et al, *Praktek Pemberian Hak Atas Tanah Negara Yang Berasal Dari Hak-Hak Barat Atas Tanah di Kotamadya Surabaya*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 1992.

### **Skripsi**

Yushari, Andi, "Keberadaan Lembaga Konsinyasi dalam Pengelolaan Keuangan Negara", **Skripsi**, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2013.

Rahantoknam, Jeanet Ivon, "Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Yang Pembayaran Ganti Kerugiannya Melalui Konsinyasi", **Skripsi**, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2014.

### **Tesis**

Muntafiah, "Perolehan Hak Atas Tanah oleh Pembeli Bangunan Di Atas Negara Bekas Hak Guna Bangunan (HGB)", **Tesis**, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2007, h.27. Daftar bacaan Kasad, Putri Rejedi, *Perjanjian*, Tesis, Surabaya : Universitas Airlangga, 2012.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Undang-Undang Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843).

- Undang-Undang No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312).
- Undang-undang No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469).
- Undang-Undang 12 Tahun 1994 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569).
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688).
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247).
- Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5280).
- Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2344).
- Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1963 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2555).
- Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1963 tentang Hubungan Sewa Menyewa Perumahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1963 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2586).
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1981 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1963 tentang Hubungan Sewa Menyewa Perumahan;
- Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1994 tentang Penghunian Rumah oleh Bukan Pemilik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 73).
- Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3643).

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3696).

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4532).

Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Pelaksanaan Beberapa Ketentuan UUPA.

Keputusan Presiden RI Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pokok-Pokok Kebijakan dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-hak Barat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1979 Tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Permohonan dan Pemberian Hak Baru atas Tanah Asal Konversi Hak- Hak Barat.

Keputusan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 1994 tentang Tata Cara Perolehan Tanah Bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal.

Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No. 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah.

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri cq. Direktur Jenderal Agraria tanggal 30 Agustus 1979 Nomor Btu.8/356/8/ 9 Perihal Keputusan Presiden No. 32 Tahun 1979 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 1979.

#### **Putusan Pengadilan**

Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 71/Pdt.G/2013/PN Kdr. tertanggal 19 Juni 2014.

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 325/Pdt.G/2010/PN.Sby tertanggal 22 Desember 2010.

Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 461/PDT/2011/PT.SBY tertanggal 12 Agustus 2011.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 3224 K/Pdt/2012 tertanggal 31 Juli 2013.

**Catatan Perkuliahan**

Sumedi, *Catatan Perkuliahan Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2015.

**Internet**

Badan Pertanahan Nasional, “*Inovasi Layanan Pertanahan*”, <http://www.bpn.go.id/Publikasi/Inovasi>, dikunjungi pada tanggal 17 November 2015.